BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan paling mendasar yang dihadapi oleh setiap negara, khususnya negara berkembang. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, serta kondisi lingkungan. Todaro dan Smith (2012) menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya menghasilkan pertumbuhan yang maksimal, tetapi juga menghilangkan atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran.

Menurut Badan Pusat Statistik (2023), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum pangan yang setara dengan 2.100 kilokalori per orang per hari, sedangkan GKNM mencakup kebutuhan minimum non-makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. World Bank (2020) mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi di mana seseorang hidup dengan pengeluaran di bawah 2,15 dolar AS per hari, dan menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya menyangkut dimensi pendapatan, tetapi juga dimensi kesehatan, pendidikan, dan ketahanan terhadap guncangan ekonomi.

Dari sisi ekonomi, kemiskinan pada dasarnya lahir dari ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan akses terhadap modal dan pasar kerja formal.

2.1.2 Indeks Keparahan Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi jumlah atau persentase penduduk miskin saja. Foster, Greer, dan Thorbecke (1984) memperkenalkan indeks kemiskinan yang dikenal sebagai indeks FGT, yang terdiri atas tiga ukuran. Pertama, P0 (*Headcount Index*) yang mengukur persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kedua, P1 (*Poverty Gap Index* atau Indeks Kedalaman Kemiskinan) yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Ketiga, P2 (*Poverty Severity Index* atau Indeks Keparahan Kemiskinan) yang mengukur ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran yang paling sensitif karena mempertimbangkan tidak hanya seberapa jauh penduduk berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga seberapa timpang kondisi antarindividu dalam kelompok penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin besar ketimpangan yang terjadi di dalam kelompok penduduk miskin. Secara matematis, indeks FGT dirumuskan sebagai:

$$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left(\frac{z - y_i}{z}\right)^\alpha$$

Keterangan: n = jumlah total penduduk, q = jumlah penduduk miskin, z = garis kemiskinan, y_i = pengeluaran per kapita penduduk ke-i, dan α = derajat sensitivitas

terhadap kemiskinan (0, 1, atau 2). Ketika $\alpha = 2$, maka diperoleh Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

2.1.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kualitas sumber daya manusia sekaligus taraf keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu daerah. Badan Pusat Statistik (2023) mendefinisikan rata-rata lama sekolah sebagai jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Indikator ini diasumsikan tidak akan turun dalam kondisi normal, mengingat pendidikan yang telah ditempuh tidak dapat diambil kembali.

Hubungan antara pendidikan dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) yang dikembangkan oleh Becker (1964). Teori ini menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan merupakan bentuk investasi pada diri manusia yang secara langsung meningkatkan produktivitas dan kemampuan menghasilkan pendapatan. Individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih produktif, lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan teknologi, dan memiliki akses yang lebih luas terhadap pasar kerja formal dengan upah yang lebih tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi rata-rata lama sekolah suatu wilayah, semakin besar proporsi penduduk yang memiliki kualifikasi memadai untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Todaro dan Smith (2012) juga menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran ganda dalam pembangunan ekonomi, yaitu sebagai tujuan pembangunan itu sendiri

sekaligus sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya termasuk pengurangan kemiskinan. Tanpa peningkatan pendidikan yang merata, pertumbuhan ekonomi yang terjadi cenderung tidak inklusif dan gagal menjangkau kelompok masyarakat paling bawah.

2.1.4 Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah arus investasi yang masuk ke suatu negara dari investor asing, yang mencakup pembentukan bisnis baru maupun akuisisi terhadap perusahaan yang sudah ada. PMA berbeda dari investasi portofolio karena melibatkan kepemilikan dan kendali langsung terhadap aset produktif di negara tujuan. Dalam ekonomi pembangunan, PMA dianggap sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang penting, khususnya bagi negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan modal domestik (Todaro & Smith, 2012).

Secara teoritis, hubungan antara PMA dan kemiskinan dapat dipahami melalui kerangka teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*). Teori ini menekankan peran *knowledge spillovers* dan akumulasi modal manusia sebagai pendorong pertumbuhan jangka panjang. PMA berperan sebagai stimulus pertumbuhan melalui dua jalur utama. Secara langsung, PMA yang masuk ke sektor padat karya dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja berkeahlian rendah yang banyak berasal dari kelompok miskin, sehingga secara langsung menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Secara tidak langsung, PMA menciptakan keterkaitan (*linkage*) dengan pelaku usaha domestik melalui rantai pasokan (*backward linkage*)

maupun distribusi output (*forward linkage*), serta menghasilkan *spillover* teknologi dan keahlian manajerial yang meningkatkan kapasitas produksi domestik.

2.1.5 Indeks Penilaian Integritas

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu dimensi penting dari konsep *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Integritas mencerminkan komitmen dan konsistensi penyelenggara negara dalam menjalankan amanah publik sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di Indonesia, pengukuran integritas pemerintahan dilakukan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menghasilkan Indeks Penilaian Integritas (IPI) sebagai tolok ukur seberapa baik suatu instansi pemerintah dalam mengelola risiko korupsi dan menerapkan sistem antikorupsi dalam proses birokrasinya. KPK menetapkan tiga kategori penilaian dalam indeks ini, yaitu Rentan (0–72,9), Waspada (73–77,9), dan Terjaga (78–100) (KPK, 2025).

Hubungan antara kualitas tata kelola dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui teori institusional yang dikembangkan oleh North (1990). Menurut North (1990), institusi adalah aturan main (*rules of the game*) dalam masyarakat yang membentuk insentif bagi seluruh pelaku ekonomi. Institusi yang kuat dengan penegakan hukum yang konsisten, perlindungan hak kepemilikan yang jelas, dan birokrasi yang bebas korupsi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya menguntungkan seluruh lapisan masyarakat. Sebaliknya, institusi yang lemah dan korup

menciptakan distorsi dalam alokasi sumber daya publik, menghambat masuknya investasi, dan melemahkan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan.

World Bank (2017) menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi karena mendistorsi hukum dan melemahkan fondasi institusi yang menyokong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan indeks penilaian integritas secara teoritis berpengaruh negatif terhadap indeks keparahan kemiskinan melalui tiga jalur utama, yaitu efisiensi alokasi anggaran publik yang lebih tepat sasaran, penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif, dan distribusi program bantuan sosial yang lebih akuntabel kepada kelompok miskin.

2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Badan Pusat Statistik (2023) mendefinisikan pengangguran terbuka sebagai penduduk yang termasuk angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, atau sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran yang tinggi berarti sebagian besar masyarakat usia produktif tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sehingga tidak memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya.

Hubungan antara pengangguran dan kemiskinan dapat dipahami melalui perspektif teori ketenagakerjaan dan Hukum Okun. Hukum Okun menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan output. Ketika pengangguran meningkat, output perekonomian menurun, distribusi pendapatan menjadi

lebih sempit, dan jumlah penduduk yang rentan terhadap kemiskinan semakin besar. Todaro dan Smith (2012) menambahkan bahwa pengangguran di negara berkembang tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga pada keluarga dan komunitas di sekitarnya melalui mekanisme penurunan permintaan agregat dan tekanan pada anggaran rumah tangga, sehingga dampaknya terhadap kemiskinan bersifat kumulatif.

Secara teoritis, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap indeks keparahan kemiskinan. Semakin tinggi TPT, semakin besar proporsi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan, sehingga angka kemiskinan cenderung meningkat. Namun demikian, hubungan ini tidak selalu bersifat linear dalam konteks negara berkembang karena sebagian besar penduduk miskin justru termasuk dalam kelompok *working poor*, yakni mereka yang bekerja di sektor informal dengan produktivitas dan upah yang sangat rendah (World Bank, 2020).

2.2 Penelitian Terdahulu

Monang et al. (2018) menemukan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan menekan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Sumatera Utara. Sejalan dengan itu, Kevin et al. (2022) menemukan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, dan Gethin (2025) menemukan bahwa ekspansi pendidikan menyumbang 50–100 persen pertumbuhan pendapatan kelompok 20 persen termiskin di dunia. Berbeda dengan ketiganya, Agyepong dan Kuuwill (2025) menemukan bahwa pendidikan hanya

signifikan menurunkan status kemiskinan rumah tangga petani di Ghana, namun tidak berpengaruh terhadap kedalaman maupun keparahannya.

Ofori et al. (2021) menemukan bahwa aliran modal asing di 42 negara Sub-Sahara Afrika hanya efektif menurunkan keparahan kemiskinan apabila disertai penguatan kelembagaan. Sejalan dengan itu, Lessmann (2013) menemukan bahwa PMA memperbesar ketimpangan regional secara signifikan di negara berkembang, namun tidak di negara berpendapatan tinggi, dan Hornok dan Raeskyesa (2023) menemukan bahwa investasi melalui zona ekonomi di Indonesia justru meningkatkan ketimpangan pendapatan di dalam provinsi. Namun, Aloui et al. (2024) menemukan bahwa FDI justru signifikan mengurangi kemiskinan di Afrika dan Amerika Latin apabila disertai kualitas tata kelola yang baik.

Hartwig dan Sturm (2025) menemukan bahwa korupsi yang rendah justru berasosiasi dengan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi pada sampel hingga 150 negara, terkait dengan besarnya sektor informal. Sejalan dengan itu, Gökçeli (2025) menemukan bahwa perbaikan kualitas institusi di Amerika Latin memperburuk distribusi pendapatan pada tahap awal, baru membaik setelah melewati ambang batas tertentu. Namun, Khasanah (2021) menemukan bahwa tata kelola pemerintahan yang buruk justru meningkatkan kemiskinan di Indonesia, dan Jindra dan Vaz (2019) menemukan bahwa tata kelola yang baik tetap menurunkan kemiskinan multidimensi secara signifikan di negara berpendapatan menengah.

Ayuni et al. (2026) menganalisis determinan kemiskinan pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat menggunakan data panel periode 2014–2023, dan

menemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat, kedalaman, dan keparahan kemiskinan. Studi ini turut menyoroti bahwa pengangguran jangka panjang di wilayah perbatasan tersebut lebih tepat diatasi melalui pelatihan kerja yang berorientasi pasar dan penyerapan investasi padat karya, dibandingkan sekadar menekan angka pengangguran secara statistik. Sejalan dengan itu, Lismana dan Sumarsono (2022) menemukan pola yang sama pada data kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2017–2020, di mana tingkat pengangguran juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa celah yang menjadi landasan kebaruan penelitian ini. Pertama, dari sisi variabel, penelitian ini memperkenalkan Indeks Penilaian Integritas (IPI) sebagai variabel independen yang belum pernah digunakan dalam penelitian analisis keparahan kemiskinan antarprovinsi di Indonesia. Kedua, dari sisi variabel dependen, penelitian ini secara khusus menggunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mampu menggambarkan kondisi kelompok termiskin secara lebih mendalam dibandingkan ukuran kemiskinan konvensional. Ketiga, dari sisi metode dan periode, penelitian ini menggunakan data panel 32 provinsi tahun 2021–2025 yang mencakup fase pemulihan pascapandemi COVID-19, sebuah penelitian yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur kemiskinan di Indonesia.